

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sekarang ini maraknya berita mengenai indikasi penyimpangan kecurangan atau *fraud* pada suatu perusahaan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawainya membuat sadar bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk membenahi ketidak beresan tersebut. Walaupun saat ini sorotan utama sering terjadi pada manajemen puncak perusahaan, namun sebenarnya penyimpangan perilaku tersebut bisa juga terjadi diberbagai lapisan kerja organisasi. Permasalahan *fraud* dapat terjadi dimana saja. Tidak dapat dijamin bahwa suatu organisasi atau perusahaan dapat terbebas dari kemungkinan terjadinya *fraud*.

*Fraud* dapat membawa akibat kerugian *financial*, rusaknya reputasi, permasalahan hukum, hingga bangkrutnya perusahaan. *Fraud* berkaitan dengan ketidakjujuran manusia. Kecurangan atau *fraud* menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta, hak orang atau pihak lain. Kecurangan dapat diartikan sebagai salah penyajian yang disadari terhadap suatu kebenaran atau menyembunyikan fakta material untuk mempengaruhi orang lain melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan, namun dalam beberapa kasus khususnya yang dilakukan secara disengaja mungkin merupakan suatu kejahatan. Diaz (2013:4). Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak korupsi. Sekarang ini bagi kebanyakan orang korupsi bukan lagi

merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Korupsi merupakan *issue* kecurangan yang besar di negara Indonesia. Masalah kecurangan dalam bentuk korupsi yang terjadi di perusahaan perlu diketahui akar penyebabnya serta perlu diketahui bagaimana cara mengatasinya. Salah satu contoh fenomena yang terjadi berkaitan dengan kecurangan terjadi pada salah satu perusahaan BUMN di Indonesia yaitu PT TELKOM (Persero). Berikut contoh kongkrit fenomena terbaru:

Diduga ada korupsi dalam penunjukan langsung PT INTI dan PT LEN oleh PT Telkom Indonesia dalam proyek pengadaan dan pemasangan modernisasi jaringan akses kabel tembaga dengan pola *trade in trade off*. Ada sebuah konspirasi antara Pimpinan PT Telkom, PT Inti dan PT Len yang berkedok sinergi antara BUMN. Sehingga, langsung menyerahkan proyek ke PT Inti dan PT Len. Tanpa dilakukan tender yang sesuai dengan prosedur, tidak ada perbandingan perusahaan luar sama sekali. Selain itu, adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 1,5 triliun dari nilai pekerjaan seluruhnya Rp 5 triliun, yaitu Rp 2,7 triliun untuk PT INTI dan Rp 2 triliun untuk PT LEN. ([www.suarapembaruan.com](http://www.suarapembaruan.com))

Berdasarkan fenomena di atas, dapat ditelaah bahwa telah terjadi kecurangan pada PT Telkom. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya sikap pimpinan Telkom yang secara yakin menunjuk dua perusahaan BUMN lainnya seperti PT INTI dan PT LEN untuk bekerjasama menjalankan proyek pengadaan dan pemasangan modernisasi jaringan akses kabel tembaga dengan pola *trade in trade off*. Pihak-pihak tersebut diduga telah terjadi kolusi dimana dua atau lebih pihak berkonspirasi untuk melakukan pencurian (korupsi) di tempat mereka

bekerja. Konspirasi tersebut ditujukan dengan adanya kerjasama yang dilakukan dengan tender yang tidak sesuai dengan prosedur karena mengatas namakan sesama BUMN, dimana seharusnya dilakukan perbandingan dengan perusahaan luar. Terjadinya kolusi menunjukkan bahwa pengendalian yang ada, tidak berjalan secara efektif.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan. Menurut Arens, Elder dan Beasley (2008:432) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan antara lain: *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *razionalization* (rasionalisasi/pembenaran) yang kemudian dikenal dengan elemen kecurangan atau *fraud triangle*. Menurut Kumaat (2011:139) Salah satu faktor pemicu dari terjadinya kecurangan tersebut yaitu adanya faktor *opportunity* (kesempatan) yang mengambil keuntungan melalui cara-cara yang merugikan. Kesempatan itu dapat berupa kelemahan yang melakat pada sistem pengendalian internal yang terdapat di perusahaan, yaitu proses kerja atau pengorganisasian kerja (*business process*) dengan kondisi antara lain: yang pertama desain pengendalian internal yang kurang tepat, sehingga meninggalkan ‘celah’ resiko, kedua praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman (*common business sense*) yang berlaku, ketiga pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap implementasi *business process*, dan yang terakhir evaluasi yang tidak berjalan terhadap *business proces* yang berlaku.

Lemahnya pengendalian internal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya dan maraknya tindakan kecurangan. Pengendalian internal merupakan suatu cara yang berperan sebagai pencegah dan pendeteksi

kecurangan yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta sistem teknologi informasi yang ada di perusahaan. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, serta ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku Azhar Susanto (2013:95).

Salah satu contoh fenomena mengenai lemahnya sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

Dalam IHPS(Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) I tahun 2013 terdapat 21 obyek pemeriksaan terkait BUMN dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang meliputi pelaksanaan, subsidi,kewajiban pelayanan umum (KPU), operasional BUMN, dan pengelolaan pendapatan,biaya,investasi,dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), terdapat 150 kasus penyimpangan , 234 kasus, terkait kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan 276 kasus terkait ketidak patuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari 510 kasus yang ada, sebanyak 93 kasus merupakan kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan di BUMN senilai Rp 2,60 triliun. Selain itu, terdapat 28 kasus ketidakefektifan senilai Rp 44,75 triliun di beberapa BUMN karena tidak tepat sasaran.([www. Aktual.com](http://www.Aktual.com))

BPK menemukan temuan yang berulang, seperti kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 56,98

triliun. Dalam semester I tahun 2013 BPK telah memeriksa 579 objek pemeriksaan, dengan rincian 519 objek pemeriksaan laporan keuangan, 9 objek pemeriksaan kinerja dan 69 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari pemeriksaan itu, BPK mengungkap sebanyak 13.969 kasus kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap undang undang dengan nilai Rp 56,98 triliun.

Jumlah kasus kelemahan SPI sebanyak 5747, sebanyak 2.854 kasus merupakan penyimpangan administrasi dan sebanyak 779 kasus dengan nilai Rp 46,24 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Sementara itu, sebanyak 4.589 kasus senilai Rp 10,74 triliun merupakan ketidakpatuhan, sehingga mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Atas temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi berupa penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/ pemerintah daerah atau perusahaan negara. Dari seluruh temuan BPK tersebut sekitar Rp 372,40 miliar telah disetorkan kembali ke kas negara atas rekomendasi BPK diatas. Jumlah tsb sangat minim ketimbang temuan BPK semester 1 2013.

[www.akuntanonline.com](http://www.akuntanonline.com)

**Tabel 1.1 Fenomena Kelemahan Pengendalian Internal**

Ket	PDTT	PKBL	Kelemahan SPI	Ketidak Patuhan	Kerugian Negara	Tidak Tepat Sasaran
IHPS 2013	21 Kasus	150 Kasus	234 Kasus	276 Kasus	93 Kasus	28 Kasus
BPK 2013	-	-	13.696 Kasus	4.589 Kasus	519 Kasus	78 Kasus

Berdasarkan fenomena di atas maka jelaslah bahwa pengendalian internal mempunyai peranan dan fungsi yang penting terhadap pencegahan kecurangan. Pengendalian internal yang kurang baik dapat berdampak terhadap terjadinya banyak permasalahan dalam suatu perusahaan. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan dan *fraud* serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang (Ruslan,2009).

Pengendalian internal menurut menurut COSO (2013) memiliki lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Komponen keempat dari pengendalian internal adalah informasi dan komunikasi, informasi diperlukan oleh semua tingkatan manajemen organisasi untuk pengambilan keputusan informasi yang berkualitas merupakan bagian dari sistem pengendalian intern.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan informasi modus operasi dari pelaku kecurangan semakin canggih dan bervariasi. Informasi merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan untuk memperoleh suatu keputusan mengenai apa yang akan atau tidak akan dilakukan. Para pelaku akan cenderung mencari celah untuk melakukan kecurangan dari lemahnya sistem pengendalian intern. Saat ini perusahaan atau instansi sudah mulai meninggalkan sistem manual dan beralih ke sistem terkomputerisasi, sistem terkomputerisasi dapat membantu menghasilkan suatu informasi yang berkualitas guna para pemakainya.

Pengendalian intern merupakan bagian integral dari sistem informasi akuntansi, yang merupakan suatu proses yang dijalankan untuk dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya dalam perusahaan. Sistem informasi akuntansi adalah bersatunya sebuah struktur dalam entitas seperti bisnis perusahaan yang memperkerjakan sumber daya dan komponen lainnya untuk merubah data ekonomi ke informasi akuntansi dengan tujuan memuaskan kebutuhan para pengguna (Wilkinson 2010:7). Sistem informasi akuntansi dirancang sedemikian rupa oleh suatu perusahaan sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu untuk menghasilkan informasi yang relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Dalam suatu sistem informasi akuntansi terkandung unsur pengendalian, maka baik buruknya sistem informasi akuntansi sangat mempengaruhi kualitas informasi yang akan dihasilkan dan kualitas sistem informasi akuntansi sangat mempengaruhi fungsi manajemen dalam melakukan pengendalian, karena informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi itu akan dijadikan salah satu dasar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.

Kualitas sistem informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang baik tidak akan menyesatkan para pengambil keputusan saat mengelola organisasinya dan mampu mendeteksi kemungkinan resiko sejak dini. Dengan didukung oleh informasi yang berkualitas dan pengendalian internal yang baik maka tata kelola perusahaan akan berjalan dengan baik. Sistem informasi akuntansi yang berkualitas mampu mendeteksi adanya penyimpangan kecurangan atau *fraud* yang terjadi didalam lingkungan perusahaan sedini mungkin yang

dapat dilakukan oleh para pegawai ataupun manajemen puncaknya, sehingga perusahaan atau instansi mampu mencegah tindakan *fraud* dengan lebih cepat, agar tidak lebih merugikan perusahaan atau instansi secara lebih luas lagi. Dengan menerapkan pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi maka perusahaan akan lebih mudah mendapatkan informasi yang berkualitas yang dapat juga di audit. Sehingga perusahaan mampu mencapai tujuannya dan meminimalkan resiko. Melihat pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi di dalam perusahaan, maka tidak dapat dibayangkan bagaimana jadinya kalau perusahaan tidak memiliki sistem informasi akuntansi yang memadai. Perusahaan tersebut mungkin tidak dapat memproses transaksinya secara jelas, terinci dan terstruktur. Kemudian perusahaan tersebut mungkin tidak dapat memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya yang diperlukan untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan yang menyangkut aktivitas dan kelangsungan hidup perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Haloman Ompusunggu (2002) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal” dan juga penelitian dari Lisa Amelia (2013) dengan judul “Pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kecurangan”. Namun pada penelitian ini penulis hanya akan membahas mengenai kualitas sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal, dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan.

Pertimbangan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang, pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal berbasis COSO dan dampaknya pada pencegahan kecurangan. Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan salah satu perusahaan BUMN dengan memiliki cakupan kegiatan yang luas dan kompleks sehingga dalam beroperasi diperlukan adanya pengawasan internal agar tidak terjadi kecurangan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “ **PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP PENGENDALIAN INTERNAL BERBASIS COSO DAN DAMPAKNYA PADA PENCEGAHAN KECURANGAN (Studi Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung).** ”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan identifikasi masalah yang akan diteliti oleh penulis, antara lain:

1. Bagaimana kualitas sistem informasi akuntansi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
2. Bagaimana pengendalian internal berbasis COSO pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
3. Bagaimana pencegahan kecurangan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

4. Bagaimana pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal berbasis COSO pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
5. Bagaimana pengaruh pengendalian internal berbasis COSO terhadap pencegahan kecurangan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi yaitu untuk menganalisis dan membuat kesimpulan mengenai kualitas sistem informasi terhadap pengendalian internal berbasis coso pada pencegahan kecurangan studi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas sistem informasi akuntansi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
2. Untuk mengetahui pengendalian internal berbasis COSO pada pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
3. Untuk mengetahui pencegahan kecurangan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal berbasis COSO pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian internal berbasis COSO terhadap pencegahan kecurangan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi khususnya pada bahasan Sistem Informasi Akuntansi (SIA).

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris**

1. Bagi Penulis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai pemanfaatan teknologi informasi yang menghasilkan kualitas sistem informasi terhadap pengendalian internal berbasis coso pada pencegahan kecuranga di PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
  - b. Hasil penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan

pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan mengenai kualitas sistem informasi terhadap pengendalian internal berbasis coso pada pencegahan kecurangan.

## 3. Bagi Instansi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kualitas sistem informasi terhadap pengendalian internal berbasis coso pada pencegahan kecurangan dengan memacu pada penelitian yang lebih baik.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117, Indonesia. Telp. (022) 4230031, Fax. (022) 4203342, *Contact Center*: [kotak\\_pelanggan@kereta-api.co.id](mailto:kotak_pelanggan@kereta-api.co.id) Website: [www.kereta-api.co.id](http://www.kereta-api.co.id). Penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.